



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA
TAHUN 2023**

JANUARI 2023



RENCANA KINERJA TAHUNAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Tahun 2023 merupakan gambaran program kerja Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dalam 1 (satu) tahun mendatang yang dijabarkan dari Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN 2020–2024 dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) BNN tahun 2023.

Dokumen RKT Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN 2023 memuat sasaran, target kinerja, dan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di lingkungan BNN.

Rencana kinerja program dan kegiatan pada RKT Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN 2023 menjadi dokumen sumber bagi perumusan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Tahun 2023, yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023.

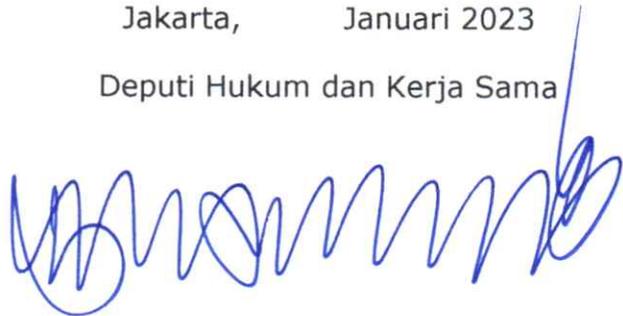
Diharapkan RKT ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang akan dihasilkan oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada kita dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah kita rencanakan.

Jakarta, Januari 2023

Deputi Hukum dan Kerja Sama

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and flourishes, positioned above the printed name.

Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D.

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, saat ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa dan mahasiswa tetapi juga pelajar SD hingga pelajar setingkat SMU. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, dan selalu ingin tahu. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kondisi tersebut menjadi dasar Pemerintah menetapkan "**Indonesia Darurat Narkoba**".

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNN memegang posisi yang sangat strategis dalam menyatukan langkah untuk menggerakkan seluruh instansi pemerintah maupun komponen masyarakat dengan lebih serius, aktif dan ambisius untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang merupakan tugas bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara dalam melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) agar permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat segera diatasi.

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, maka dalam menyelenggarakan fungsinya, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN memiliki peran cukup strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan Narkoba melalui pelaksanaan P4GN di bidang hukum dan kerja sama. Peran strategis tersebut menuntut kapasitas dan kapabilitas yang optimal dari unit-unit organisasi pelaksana tugas dan fungsi kedeputian di lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.

Sementara itu, sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, isu dan permasalahan yang dihadapi oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga semakin kompleks. Adapun identifikasi isu dan permasalahan yang dihadapi Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN sebagaimana termuat dalam Renstra Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN 2020–2024 dan diperkirakan masih/akan terjadi di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Isu Layanan Hukum

Permasalahan menonjol dalam isu layanan hukum adalah di antaranya terbatasnya SDM yang mempunyai kemampuan dalam menyusun regulasi dan pelayanan hukum; pihak klien dalam bantuan hukum terkadang kurang responsif dalam memenuhi permintaan tim bantuan hukum dalam hal melengkapi data dukung dan alat bukti dalam proses litigasi; revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang belum disahkan oleh Presiden sehingga belum dapat menjawab perkembangan permasalahan Narkotika yang dihadapi dilapangan, seperti pengaturan tentang *New Psikoactive*

Substance (NPS), serta belum tersusunnya regulasi berupa Peraturan Badan Narkotika Nasional mengenai administrasi penyidikan sehingga administrasi penyidikan yang ada berbeda-beda tiap wilayah.

b. Isu Kerja Sama

Permasalahan menonjol dalam isu kerja sama di antaranya terkait komitmen mitra kerja sama dalam implementasi terhadap Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang tidak melaksanakan ruang lingkup kerja sama yang menjadi kesepakatan; perbedaan regulasi di setiap negara dalam penanganan masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika; masih adanya ego sektoral mengenai penanganan kerja sama dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika; serta terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai termasuk ruang kerja yang kurang kondusif.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan program/kegiatan Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN pada tahun 2023 sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Tahun 2023. RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dalam melaksanakan program/kegiatannya.

RKT Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023 menggambarkan program/kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama berdasarkan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target Kinerja Tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen dalam pencapaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.

RKT Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023 merupakan tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi dan tujuan Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, serta sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023.

2. Hasil Evaluasi

Peran Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dalam melaksanakan tugas pelaksanaan P4GN di bidang hukum dan kerja sama telah menghasilkan capaian tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks layanan hukum bidang P4GN	4	3,8	95%
	Persentase efektifitas kerja sama nasional dan internasional	100%	106,39%	106,39%

a. Indeks layanan hukum bidang P4GN

Hasil pencapaian kinerja indeks layanan hukum di bidang P4GN sebesar 3,8, hasil ini belum mencapai target capaian sebesar 4 sehingga capaian indeks layanan hukum di bidang P4GN adalah 95%. Hasil capaian indeks layanan hukum di bidang P4GN tahun 2022 jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2021 masih pada kisaran indeks yang sama yaitu 3,8.

b. Persentase efektifitas kerja sama nasional dan internasional.

Pencapaian kinerja persentase efektifitas kerja sama di atas menunjukkan bahwa kerja sama bidang P4GN di tingkat nasional dan internasional yang terpantau berjalan efektif sebesar 106,39%, dengan kata lain hasil ini dapat dicapai melebihi target capaian sebesar 100% sehingga capaian persentase kinerja adalah 106,39%. Hasil capaian kinerja persentase efektifitas kerja sama tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 90,70% mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 15,69%. Hal

ini disebabkan karena adanya beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain:

- 1) adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2025;
- 2) menurunnya level pandemi covid-19 di Indonesia dan negara-negara lain, sehingga kerja sama BNN dengan mitra kerja sama dalam dan luar negeri dapat terlaksana dengan baik;
- 3) adanya kesadaran masing-masing pihak bahwa permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak dapat diselesaikan oleh BNN sendiri namun perlu keterlibatan seluruh komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri;
- 4) meningkatnya kesadaran instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan upaya P4GN; dan
- 5) kesadaran masing-masing pihak untuk menindaklanjuti kerja sama dengan berbagai kegiatan P4GN sesuai dengan ruang lingkup yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN 2020–2024 dan dirumuskan sebagai pendekatan dalam menyelesaikan isu/permasalahan tahun 2023 sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya. Adapun arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Tahun 2023 ***“Penguatan Jaringan Kerja Sama Kelembagaan, Hukum, Inovasi, dan Teknologi”***. Arah kebijakan tersebut memiliki cakupan dalam hal memperluas dan memperkuat hubungan dan kemitraan kelembagaan, mengembangkan dan memperkuat penyelenggaraan sistem hukum, dan menumbuhkembangkan tradisi riset dan inovasi dalam mendesain kebijakan P4GN. Arah kebijakan ini diharapkan mampu mengisi kekosongan model arah kebijakan dalam menanggulangi permasalahan Narkotika. Pada prakteknya arah kebijakan ini akan melahirkan kegiatan yang mampu menjadi *supporting* bagi kinerja *core business* dan berdampak bagi masyarakat.

Adapun strategi yang dipilih dalam pelaksanaan arah kebijakan ini sebagai berikut:

- a. Memperluas hubungan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam penguatan sistem hukum dan jaringan arsitektur kinerja BNN;
- b. Meningkatkan kegiatan observasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama serta revisi apabila ada ruang lingkup kerja sama yang tidak dapat diimplementasikan;
- c. Meningkatkan sinergitas kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral dalam menangani perbedaan regulasi di setiap negara terkait masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- d. Penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum, pengkajian terhadap produk hukum Narkotika, dan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan perkembangan permasalahan Narkotika.
- e. Koordinasi intensif kepada Sekretariat Negara agar revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika segera di sahkan guna kepastian hukum.
- f. Pelatihan penyusunan regulasi, pelayanan hukum, dan penyusunan dokumen kerja sama.
- g. Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta ruang kerja yang kondusif.
- h. Memperkuat riset sebagai dasar pengembangan kebijakan bidang P4GN dan diperkuat teknologi.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN menetapkan RKT 2023 sesuai kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, dengan tetap mempedomani Renja BNN Tahun 2023. RKT Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Tahun 2023 merupakan gambaran rencana program kerja Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dalam satu tahun mendatang. Adapun sasaran, target kinerja, dan kebutuhan pendanaan Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Tahun 2023 sebagai berikut:

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN (RIBU)
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks dan layanan hukum bidang P4GN	4	4.671.541.000
		Persentase efektifitas kerja sama nasional dan internasional	100%	6.373.366.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN	Indeks kepuasan penyelenggaraan organisasi	12 Layanan	951.214.000

BAB III

PENUTUP

Dokumen RKT Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Tahun 2023 menggambarkan target kinerja dan anggaran kumulatif bidang hukum dan kerja sama dari seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN. RKT Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Tahun 2023 ini akan menjadi dokumen sumber bagi penetapan perjanjian kinerja unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN untuk tahun 2023. Dengan demikian, dokumen RKT Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Tahun 2023 juga menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan bidang hukum dan kerja sama di tahun anggaran 2023.

RKT Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama disusun untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) atau sistem pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Adapun sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT tahun 2023 adalah Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama berkewajiban melaksanakan program dalam RKT tahun 2023 untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam periode tahun 2023. Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dengan tersusun RKT Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana program, kegiatan yang akan dilaksanakan maupun target tahunan yang hendak diwujudkan Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023.

LAMPIRAN I
TARGET KINERJA DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN
TAHUN 2023

1. Target Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN	4
		Persentase efektifitas kerjasama nasional dan internasional	100%

2. Target Kinerja Direktorat

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya layanan litigasi dan pembinaan hukum	Indeks Regulasi Bidang P4GN	4
		Indeks Pelayanan Bantuan Hukum	4
2.	Meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase kerjasama yang efektif	100%

LAMPIRAN II
RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	%
066.01	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	11.044.907.000	100,00
3250	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	4.671.541.000	42,30
3253	Penyelenggaraan Kerja Sama Dakam dan Luar Negeri	6.373.366.000	57,70
066.02	Dukungan Manajemen	951.694.000	100,00
3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	951.694.000	100,00

LAMPIRAN III
RINCIAN KRO-RO KEGIATAN

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	VOL RO	SATUAN	ANGGARAN (RP)
3250	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum			4.671.541.000
AAA	Undang-Undang			
AAA.002	Tindak Lanjut Undang-Undang Narkotika	1	Undang-Undang	1.000.000.000
AAH	Peraturan Lainnya			
AAH.001	Peraturan Kepala BNN	4	Peraturan	1.181.424.000
AAH.002	Peraturan Badan Narkotika Nasional	2	Peraturan	380.715.000
ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
ABE.001	Rekomendasi Hukum Bidang P4GN	1	Rekomendasi Kebijakan	375.360.000
BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan			
BBA.001	Layanan Bantuan Hukum P4GN Perseorangan	200	Orang	461.062.000
BBB	Layanan Bantuan Hukum Lembaga			
BBB.001	Layanan Bantuan Hukum P4GN Lembaga	6	Institusi	1.050.926.000
BBC	Layanan Bantuan Kelompok Masyarakat			
BBC.001	Layanan Bantuan Hukum P4GN Kelompok Masyarakat	5	Kelompok Masyarakat	117.054.000
BMA	Data Informasi Publik			
BMA.001	Layanan JDIH BNN	1	Layanan	105.000.000
3253	Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri			6.373.366.000
AEA	Koordinasi			
AEA.001	Koordinasi Pembinaan Teknis Kerja Sama Bidang P4GN di Lingkungan BNNP	2	Kegiatan	195.500.000
AEA.002	Koordinasi Asistensi Kerja Sama Bid. P4GN dengan Pemerintah Daerah	3	Kegiatan	360.436.000

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	VOL RO	SATUAN	ANGGARAN (RP)
AEA.003	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang P4GN	1	Kegiatan	100.000.000
AEA.004	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Bidang P4GN dengan Instansi Pemerintah	1	Kegiatan	124.400.000
AEA.005	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Bidang P4GN dengan Komponen Masyarakat	1	Kegiatan	126.100.000
AEA.006	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Bidang P4GN di Lingkungan BNNP	10	Kegiatan	606.082.000
AEB	Forum			
AEB.001	Forum Kerja Sama Luar Negeri di Tingkat Bilateral Bidang P4GN	7	Forum	376.218.000
AEC	Kerja Sama			
AEC.001	Kerja Sama Bidang P4GN Melalui Pertemuan Tahunan Luar Negeri Tingkat International	4	Kesepakatan	1.310.972.000
AEC.002	Kerja Sama Bidang P4GN Melalui Pertemuan Tahunan Luar Negeri Tingkat Regional	3	Kesepakatan	635.986.000
AEC.003	Kerja Sama Bidang P4GN Melalui Pertemuan Tingkat Bilateral	5	Kesepakatan	952.244.000
AED	Perjanjian			
AED.001	Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Bidang P4GN	7	Dokumen	414.766.000
AED.002	Perjanjian Kerja Sama Bidang P4GN dengan Instansi Pemerintah	8	Perjanjian	585.250.000
AED.003	Perjanjian Kerja Sama Bidang P4GN dengan Komponen Masyarakat	8	Perjanjian	585.412.000

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	VOL RO	SATUAN	ANGGARAN (RP)
3239	Penyelenggaraan Ketatausahakan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan prasarana			951.214.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	951.214.000